

panduan praktis

Pelayanan Imunisasi



Kata Pengantar

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditetapkan bahwa operasional BPJS Kesehatan dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014.

BPJS Kesehatan sebagai Badan Pelaksana merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Nasional ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Masyarakat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan *stakeholder* terkait tentu perlu mengetahui prosedur dan kebijakan pelayanan dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya. Untuk itu diperlukan Buku Panduan Praktis yang diharapkan dapat membantu

pemahaman tentang hak dan kewajiban stakeholder terkait baik Dokter/Dokter Gigi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Peserta BPJS Kesehatan maupun pihak-pihak yang memerlukan informasi tentang program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan masyarakat akan mengetahui dan memahami tentang Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga pada saat pelaksanaannya masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya serta memanfaatkan jaminan kesehatan dengan baik dan benar. Tentu saja, pada waktunya buku panduan praktis ini dapat saja direvisi dan diterapkan berdasarkan dinamika pelayanan yang dapat berkembang menurut situasi dan kondisi di lapangan serta perubahan regulasi terbaru.

↳ Direktur Utama BPJS Kesehatan ↳



Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes.

Daftar Isi

I	Definisi	▸ 05
II	Landasan Hukum	▸ 05
III	Tujuan	▸ 05
IV	Sasaran	▸ 06
V	Penanggung Jawab (PIC)	▸ 06
VI	Ruang Lingkup	▸ 06
VII	Indikator	▸ 07
VIII	Implementasi Program	▸ 07
IX	Hal-hal yang harus diperhatikan	▸ 14

I Definisi

Imunisasi adalah memasukkan kuman penyakit yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh dengan cara suntik atau minum dengan maksud agar terjadi kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu di dalam tubuh

II Landasan Hukum

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 pasal 21 (3) Pelayanan imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis-B (DPT-HB), Polio, dan Campak.

III Tujuan

Bertujuan untuk meningkatkan cakupan balita yang mendapatkan imunisasi

IV Sasaran

Sasaran program meliputi semua balita peserta BPJS

V Penanggung Jawab (PIC)

Bagian Manajemen Pelayanan Primer Kantor Cabang BPJS Kesehatan

VI Ruang Lingkup

Imunisasi dasar diberikan kepada balita peserta BPJS dengan penyediaan vaksin oleh Pemerintah melalui Dinas Kesehatan setempat.

- a. Imunisasi Dasar Lengkap 0 – 11 bulan
 - 1) BCG 1 kali
 - 2) DPT-HIB 3 kali
 - 3) Polio 4 kali
 - 4) Campak 1 kali
- b. Imunisasi HB-0 bayi baru lahir agar satu paket dengan persalinan, retriaksi bukan untuk kasus Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

VII Indikator

Proses:

- Jumlah balita yang mendapat imunisasi
- Jumlah faskes primer pemberi layanan imunisasi dasar

Output:

- Meningkatnya angka cakupan balita yang mendapatkan imunisasi dasar

VIII Implementasi Program

Imunisasi Dasar

a. Perencanaan

Langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

1. Mapping data kebutuhan pelayanan imunisasi termasuk memetakan fasilitas kesehatan primer yang dapat melakukan imunisasi dasar, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat.

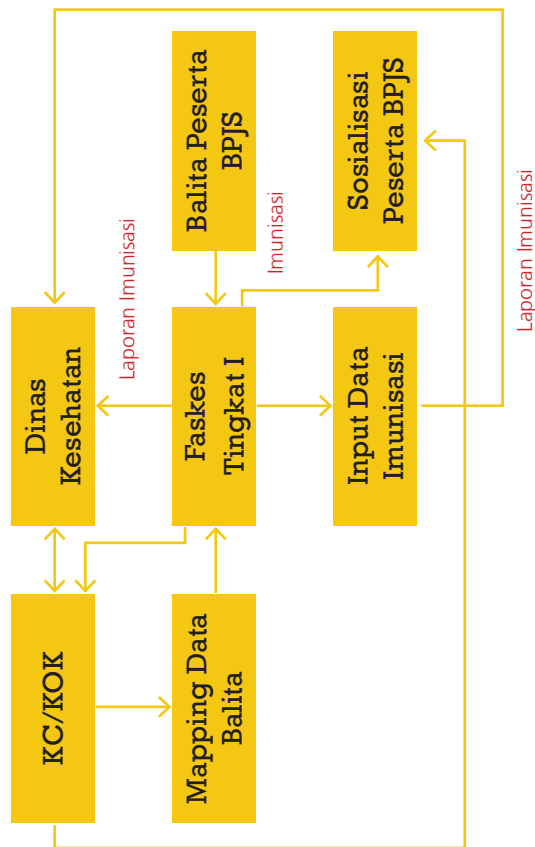
2. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk penyediaan dan distribusi vaksin.
 - a. Jenis vaksin yang disediakan oleh Pemerintah
 - Vaksin BCG
 - Vaksin Polio
 - Vaksin Campak
 - Vaksin DPT-HIB
 - b. Distribusi vaksin program pemerintah
 - Distribusi ke seluruh faskes yang melayani pemberian imunisasi.
 - Fasilitas kesehatan harus mengutamakan pemberian vaksin yang disuplai oleh pemerintah
 - Fasilitas kesehatan dapat menyediakan vaksin di luar vaksin pemerintah namun tidak ditanggung pemerintah dan biayanya ditanggung oleh peserta.
3. Melakukan koordinasi dengan Faskes Tingkat Pertama dalam penyelenggaraan pelayanan Imunisasi.
4. Melakukan sosialisasi dan pemberian informasi ke peserta BPJS Kesehatan yang memiliki Balita,

melalui Faskes tingkat pertama (Puskesmas/ Klinik/DokterKeluarga).

5. Membuat Laporan Kegiatan
Melakukan pencatatan balita yang telah mendapat layanan imunisasi dan melaporkan penggunaan vaksin ke Pemerintah



Alur Imunisasi



Pengorganisasian

1. Kantor Cabang sebagai penanggung jawab :
 - a. Melakukan koordinasi dengan dokter Faskes Tingkat Pertama,
 - b. Sosialisasi dan informasi kepada peserta,
 - c. Memonitor laporan pelayanan imunisasi dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
2. Divisi Regional memonitor cakupan balita peserta BPJS Kesehatan yang mendapatkan imunisasi.

c. Pelaksanaan

1. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama melayani balita untuk diberikan imunisasi dasar
2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama mencatat dan melaporkan pelayanan Imunisasi balita peserta BPJS Kesehatan kepada KC/KOK BPJS Kesehatan.
3. BPJS Kesehatan melakukan rekapitulasi dan membuat laporan penggunaan vaksin kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

d. Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi kegiatan dalam bentuk pencatatan dan pelaporan, diinput dalam aplikasi P-Care, dengan kegiatan meliputi :

- 1) Jumlah faskes tingkat pertama yang melayani imunisasi
- 2) Jumlah balita yang terlayani imunisasi
- 3) Jenis cakupan imunisasi dasar



IX Hal-hal yang harus diperhatikan

1. Penentuan mapping faskes yang dapat melayani imunisasi dan mendapatkan laporan pelaksanaan imunisasi
2. Memastikan sosialisasi dan Informasi pemberian Imunisasi sampai ke peserta BPJS Kesehatan
3. Memastikan komitmen Pemerintah Daerah dalam penyediaan dan distribusi vaksin
4. Mekanisme pembayaran pelayanan imunisasi harus dipahami oleh faskes primer bahwa sudah termasuk dalam komponen kapitasi
5. Pencatatan yang akurat atas pelayanan imunisasi

